



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURKHIKMAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN AKADEMIK
3. NHK : 947972

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.140.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/98 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 228.500.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC SO4GM/FERIO 1.6 MT Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
3. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
5. MOTOR, YAMAHA BBP A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
6. MOTOR, YAMAHA MIO AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 474.607.621



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.843.107.621

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.843.107.621

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.